

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Model Pembelajaran

1. Pengertian Model Pembelajaran

Menurut Helmiati (2012, Hlm. 19) Model Pembelajaran merupakan susunan rancangan pembelajaran mulai dari kegiatan awal hingga akhir yang diterapkan secara khusus oleh pendidik. Model tersebut merupakan suatu rangka untuk mengimplementasikan pendekatan, metode, strategi, dan Teknik pembelajaran. Pengertian tersebut menegaskan bahwa Model Pembelajaran bukan hanya cara mengajar saja, tetapi merupakan suatu kesatuan yang mengatur seluruh proses pembelajaran mulai dari perencanaan sampai penilaian. Sejalan dengan itu Samala *et al.* (2022) Yang menyebutkan bahwa model pembelajaran berfungsi sebagai elemen utama yang mendukung terciptanya progres belajar yang efektif, karena dapat berimbas pada tercapainya tujuan pembelajaran serta perubahan perilaku peserta didik kearah positif, apabila hal tersebut disertai dengan pemilihan model pembelajaran yang tepat. Selain itu, Norsandi & Sentosa, (2022) menegaskan bahwa Model Pembelajaran merupakan unsur penting dalam proses pembelajaran yang harus dipilih secara tepat yang bertujuan agar guru mendapatkan pengalaman belajar yang efektif.

Berlandaskan beberapa teori yang disampaikan para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah pola atau panduan yang digunakan oleh pendidik untuk mendesain dan mengimplementasikan kegiatan pembelajaran supaya pengalaman belajar mampu tercipta secara maksimal.

2. Peran Model Pembelajaran dalam Proses Pendidikan

Menurut Norsandi Dedy (2022) Model Pembelajaran adalah komponen yang krusial dalam progres pembelajaran karena guru perlu menerapkan model yang sesuai untuk mendapatkan pengalaman belajar agar tercapai secara optimal. Sejalan dengan itu Helmiati (2012, Hlm. 18) menyatakan bahwa pendidik harus menggunakan metode, strategi,

pendekatan, dan teknik atau model pembelajaran yang sesuai dan akurat supaya siswa mampu meraih kompetensi pembelajaran yang maksimal, secara kognitif, afektif maupun psikomotor. Lebih lanjut Helmiati (2012, hlm. 103-104) menegaskan bahwa pendidik tidak hanya bertugas untuk mengajar, melainkan membelajarkan siswa, sehingga pembelajaran harus berpusat pada siswa (*student centered*). Dengan demikian, model pembelajaran berfungsi untuk mengubah cara belajar dari yang berpusat pada guru ke pembelajaran yang berpusat pada siswa.

Model Pembelajaran membantu guru dalam menghadapi berbagai perubahan di dunia Pendidikan, seperti perkembangan teknologi dan kondisi sosial yang terus berubah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Model Pembelajaran bukan hanya sekedar cara mengajar, tetapi juga sebagai strategi yang menentukan baik atau tidaknya proses Pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Anisa *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa pembelajaran modern menuntut penerapan Model Pembelajaran yang berpusat pada siswa agar peserta didik lebih aktif dalam proses belajar, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan pembelajaran.

Dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila, Model Pembelajaran sangat berperan dalam membentuk karakter kewarganegaraan peserta didik, Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya bertujuan menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap demokratis, tanggung jawab terhadap masyarakat, toleransi, serta keaktifan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penggunaan Model Pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, sesuai dengan kehidupan nyata, dan mendorong partisipasi siswa menjadi sangat penting, hal tersebut sejalan dengan pendapat Warliani & Munasti, (2022) yang menyatakan bahwa Model Pembelajaran *kooperatif* dan berbasis karakter dapat membantu pembentukan nilai sosial dan karakter peserta didik melalui interaksi kelompok, refleksi pengalaman belajar, serta penguatan nilai moral dalam proses pembelajaran.

Dari teori para ahli di atas maka dapat disimpulkan Dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila, Model Pembelajaran sangat penting karena tidak hanya untuk menambah pengetahuan siswa, tetapi juga membentuk sikap dan karakter sebagai warga negara. Model Pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, sesuai dengan kehidupan nyata, dan mendorong kerja sama dapat membantu siswa memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui pengalaman belajar yang bermakna.

3. Jenis-jenis Model Pembelajaran

Menurut Fahrudin (2025) Model pembelajaran merupakan bagian penting dari strategi Pendidikan karena dapat membantu guru menciptakan pengalaman belajar yang aktif, serta bermakna bagi peserta didik. Oleh karena itu, guru harus mengetahui macam-macam cara mengajar supaya proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sejalan dengan pendapat Afendi *et al.* (2024) bahwa Model Pembelajaran diperlukan karena proses belajar pada hakikatnya melibatkan interaksi antara peserta didik, pendidik, serta lingkungan belajar sehingga diperlukan cara atau pola tertentu agar pembelajaran dapat berjalan efektif. Selain itu Setiani Ani (2023, Hlm. 8-10) mengemukakan beberapa model pembelajaran yaitu

a. Model *Discovery-Inquiry*

Pembelajaran tersebut merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student centered*), yang menekankan pada proses pemecahan masalah melalui kegiatan eksplorasi dan penemuan konsep secara mandiri dengan bimbingan guru melalui pertanyaan-pertanyaan terarah.

b. Model *Flipped Classroom*

Adalah pembelajaran yang membalik metode tradisional di mana materi biasanya diberikan pada proses pembelajaran, tetapi pada model pembelajaran ini materi diberikan sebelum proses pembelajaran sehingga ketika proses kegiatan pembelajaran, peserta didik focus untuk mendiskusikan materi atau masalah yang belum dipahami terkait materi yang telah dipelajari peserta didik dan atau mengerjakan tugas.

c. *Model Project Based Learning*

Adalah Model Pembelajaran memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik melalui konsep yang dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran ini cocok diterapkan Ketika pendidik menginginkan peserta didik terlatih untuk mampu mencari solusi dan berkolaborasi untuk mengerjakan sebuah proyek untuk mengatasi suatu permasalahan konkret yang mereka hadapi.

d. *Model Blended Learning*

Adalah Pembelajaran yang mengkombinasikan Pembelajaran tatap muka dengan Pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan berbagai macam media dan teknologi. Model pembelajaran ini dapat menjadi pilihan apabila pendidik ingin menciptakan Pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan melatih peserta didik menjadi mandiri dalam mengakses sumber belajar dan meningkatkan keterampilan teknologinya.

e. *Model Berbasis Game*

Adalah Pembelajaran yang menggunakan permainan atau Game digital untuk tujuan Pembelajaran. Model ini diterapkan oleh pendidik Ketika ingin membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan bekerja sama dalam pembelajaran yang menyenangkan.

f. *Model Self Organized Learning Environment.*

Adalah Pembelajaran yang menitikberatkan proses Pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimiliki oleh peserta didik. Model Pembelajaran ini digunakan oleh guru dalam melatih peserta didik untuk berpikir kreatif, mampu memecahkan masalah, dan mampu berkomunikasi.

Menurut Norsandi Dedy, (2022) pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila penggunaan Model Pembelajaran menjadi sangat penting karena Pembelajaran tidak hanya cukup melalui ceramah saja, melainkan memerlukan aktivitas belajar yang melibatkan pengalaman langsung

diskusi, refleksi, serta Kerjasama sosial, sejalan dengan itu Masyithah *et al.* (2025) menegaskan bahwa Model Pembelajaran menjadi hal yang krusial karena pembelajaran tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga pembentukan karakter, sikap dan keterampilan peserta didik, hal tersebut karena pemilihan Model Pembelajaran yang sesuai sangat penting, khususnya untuk mata Pelajaran Pendidikan Pancasila, hal ini karena Pembelajaran Pendidikan Pancasila tidak hanya menekankan pada pemahaman konsep, tetapi juga pembentukan sikap, karakter termasuk *civic disposition* peserta didik. Sejalan dengan itu Qalbina *et al.*, (2023) menegaskan bahwa penggunaan Model Pembelajaran yaitu *Project Based Learning* dapat meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan peserta didik karena mereka terlibat aktif dalam proses pembelajaran berbasis proyek.

Menurut teori para ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila memiliki tujuan untuk menciptakan karakter peserta didik atau *civic disposition* maka Model Pembelajaran yang dipilih sangat menentukan keberhasilannya, Model Pembelajaran inovatif seperti *cooperative learning*, *problem based learning*, *project based learning*, dan *inquiry learning* terbukti mampu dalam meningkatkan semangat serta memantik keaktifan peserta didik, kompetensi berpikir kritis, serta sikap sosial yang sejalan dengan tujuan Pendidikan Pancasila.

B. Model *Project Based Learning* (PjBL)

1. Pengertian Model *Project Based Learning* (PjBL)

Menurut Tatan Hadian (2022) *Project Based Learning* merupakan Model pembelajaran yang banyak melibatkan keaktifan siswa dalam memecahkan masalah nyata. Hal ini di dukung oleh Monica, (2024) yang menyatakan bahwa *Model Project Based Learning* memandu peserta didik dalam menjalankan suatu kegiatan atau proyek. Dengan harapan, proyek tersebut dapat menciptakan sebuah produk yang *orisinal*, maka dari itu pada prosesnya peserta didik diharuskan untuk kreatif dalam mengembangkan

gagasan yang dimiliki supaya mampu menghasilkan karya yang terdapat unsur kebergunaan.

Berdasarkan teori para ahli maka ditarik kesimpulan bahwa Model *Project Based Learning* (PjBL) adalah cara belajar melalui proyek sebagai kegiatan utamanya. Dalam model ini, peserta didik ikut aktif merancang, mengerjakan, dan menyelesaikan sebuah proyek agar bisa memahami dan mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik.

2. Karakteristik Model *Project Based Learning* (PjBL)

Menurut Achmadi (2023) Model *Project Based Learning* ini menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran yang bertanggung jawab atas progres dan hasil belajarnya, sementara itu, pendidik memiliki peran sebagai fasilitator yang menuntun dan membina kegiatan pembelajaran. Dengan cara ini peserta didik mendapatkan dorongan untuk belajar secara mandiri dan merasa bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada mereka. Sejalan dengan itu Nurhijatina *et al.*, (2024) menjelaskan bahwa *Project Based Learning* menuntut peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok, membagi peran secara adil, serta menyelesaikan tugas sesuai kesepakatan bersama. Proses Kerjasama tersebut secara langsung melatih siswa dalam karakter kewarganegaraan yaitu *civic disposition* termasuk bertanggung jawab, dan bekerja sama dengan baik.

Safitri (2025) menegaskan bahwa karakteristik PjBL yang menekankan pada produk nyata dan refleksi mampu meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap proses belajar yang dijalani, sehingga membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab. Berlandaskan teori para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik Model *Project Based Learning* memiliki ciri khas berupa pembelajaran yang berpusat pada siswa, menggunakan masalah nyata, kerja kelompok, serta menghasilkan karya nyata dan refleksi. Dengan terlibat aktif dari awal sampai akhir proyek, peserta didik terlatih mandiri dan bertanggung jawab terhadap progres serta hasil belajarnya. Kegiatan kerja sama dan refleksi dalam PjBL juga efektif membentuk sikap bertanggung jawab, disiplin, dan kemampuan bekerja

sama, sehingga model ini sangat baik untuk pembelajaran bermakna yang membentuk karakter siswa.

3. Langkah – Langkah Penerapan *Model Project Based Learning*

Menurut Tatan Hadian (2022) Model *Project Based Learning* diawali dengan pemberian masalah atau pertanyaan mendasar (*essential question*) yang akurat dengan kehidupan nyata peserta didik. Sejalan dengan pendapat Setiani, (2023, hlm. 41) mengemukakan langkah-langkah pembelajaran dalam *Project Based Learning* (PjBL) yaitu:

a. Pengenalan Masalah

Guru memantik pertanyaan (*driving question*) berkaitan dengan persoalan yang terjadi di kehidupan nyata. guru mencontohkan melalui gambar (kasus) terhadap persoalan pada kehidupan sehari-hari guna menciptakan pertanyaan. Setelahnya mendokumentasikan keseluruhan pertanyaan yang disampaikan peserta didik sebagai hasil pada sintak 1.

b. Mendesain Perencanaan Proyek

Guru membagikan kelompok dan memberikan pemahaman terhadap tugas sesuai peran masing-masing anggota kelompok. Memandu masing-masing kelompok saat berdiskusi merancang perencanaan proyek.

c. Menyusun Jadwal Proyek

Guru Bersama peserta didik membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan Proyek (tahapan-tahapan dan waktu pelaksanaannya).

d. Pelaksanaan dan Monitoring Proyek

Guru memantau dan memonitor proses berjalannya proyek peserta didik.

e. Menguji Hasil (Presentasi)

Guru memberikan penguatan terhadap hasil presentasi setiap kelompok.

f. Evaluasi dan Refleksi

Guru mengukur pemahaman (ketercapaian indikator). Evaluasi dilakukan dengan melihat aktivitas, sikap, hasil proyek, dan pemahaman (kuis). Penguatan konsep dari guru berupa review terhadap

masing-masing hasil kelompok, rangkuman atau Kesimpulan. Jika ada pemahaman konsep yang kurang tepat atau ada konsep baru maka guru meluruskan atau memberikan penjelasan konsep.

Berdasarkan teori para ahli di atas maka dapat disimpulkan Model Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL) adalah model belajar yang berpusat pada kegiatan siswa melalui tahapan-tahapan teratur. Dimulai dengan pertanyaan dari kehidupan nyata yang mendorong siswa untuk beraktivitas, Perencanaan Proyek, Penjadwalan Pemantauan, Penilaian dan Evaluasi/Refleksi.

4. Kelebihan dan Kekurangan Model *Project Based Learning*

Model Pembelajaran Berbasis Proyek mempunyai banyak keunggulan, khususnya dalam membentuk karakter siswa, Menurut Wahyu, (2013) Pembelajaran berbasis proyek mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik hal tersebut dapat dibuktikan melalui laporan penelitian yang telah dilakukan tentang pembelajaran berbasis proyek yang mengatakan bahwa ketekunan serta usaha keras peserta didik dalam menyelesaikan proyek terlihat dengan jelas, peserta didik juga terlihat lebih bersemangat dalam proses belajar, dan berkurangnya keterlambatan pada kehadiran peserta didik. Sejalan dengan pendapat Pranata *et al.*, (2025) kelebihan Model *Project Based Learning* yaitu mampu meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik, menumbuhkan kemandirian belajar, melatih kerja sama, serta membentuk karakter tanggung jawab melalui pembagian peran dan penyelesaian tugas proyek.

Namun demikian Model Pembelajaran *Project Based Learning* juga memiliki beberapa keterbatasan seperti memerlukan waktu pembelajaran yang relatif lebih lama, memerlukan kesiapan peserta didik saat mendesain pembelajaran, serta menuntut kesiapan peserta didik untuk belajar mandiri. Maka dari itu, penggunaan Model *Project Based Learning* harus disiapkan dengan matang supaya tujuan belajar dapat tercapai secara optimal. Sejalan dengan itu Damayanti, (2023) menegaskan Kekurangan dari *Project Based Learning* memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga terdapat banyak pendidik yang merasa nyaman dengan kelas tradisionalnya, dimana

pendidik menjadi objek utama, karena model pembelajaran PjBL harus siap dengan peralatan yang perlu dibeli dan Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan.

Berdasarkan teori para ahli di atas dapat disimpulkan pembelajaran berbasis proyek (PjBL) terbukti efektif untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa khususnya dalam membentuk karakter peserta didik. Namun Model ini juga mempunyai kelemahan yaitu butuh waktu yang cukup lama, serta kesiapan guru dalam perencanaan. Oleh karena itu, agar keunggulan PjBL dapat dimaksimalkan dan kelemahannya dapat diminimalkan, penerapan model ini perlu dirancang secara matang, disesuaikan dengan kondisi sekolah, serta didukung oleh kesiapan guru dan peserta didik.

C. Civic Education

1. Pengertian Civic Education

Pendidikan Kewarganegaraan yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Civic Education* atau *Citizenship Education*, pada dasarnya program ini merupakan pendidikan yang berupaya untuk membentuk karakteristik warga negara yang memiliki pemahaman pengetahuan dan keterampilan serta mampu menjalankan hak-hak dan kewajiban hingga menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Arief Wahyudi, 2020, hlm. 1) sejalan dengan pendapat Aulia *et al.*, (2024) menyatakan bahwa *civic education* merupakan terjemahan dari *citizenship education* dan menjadi bagian penting dalam sistem Pendidikan karena bertujuan membentuk karakter warga negara yang aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, terdapat beberapa dimensi yang saling berkaitan yaitu, pengetahuan (*civic knowledge*), keterampilan (*civic skills*) dan nilai-nilai sikap (*civic disposition*).

Berdasarkan para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa *civic education* atau Pendidikan kewarganegaraan Adalah salah satu program Pendidikan yang memegang peran yang krusial dalam menciptakan warga

negara yang cerdas, terampil, berkarakter, dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya. Pendidikan kewarganegaraan atau *civic education* ini tidak hanya sekedar mengajarkan tentang hak dan kewajiban seorang warga negara, melainkan juga mendukung tumbuhnya karakter yang baik serta kemauan untuk ikut berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. untuk mewujudkan tujuan tersebut, *civic education* berjalan melalui tiga hal pokok yang saling mendukung satu sama lain, yakni pemahaman tentang kehidupan bernegara, kemauan untuk bersikap dan bertindak sebagai warga negara, serta nilai dan sikap yang mencerminkan kepribadian dan warga negara yang baik.

2. Komponen *Civic Education*

Menurut Ahmad & Syahrir, (2025) Keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan atau *civic education* dalam kajian modern tidak di ukur dari seberapa jauh peserta didik memahami mata Pelajaran, akan tetapi, yang menjadi tolak ukur sesungguhnya Adalah sejauh mana peserta didik mampu mengembangkan kopetensi Kewarganeraan secara utuh dan menyeluruh, kopetensi tersebut pada umumnya mencakup tiga hal pokok yakni pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak atau sikap kewarganegaraan (*civic disposition*). Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam membentuk warga negara yang cerdas, partisipasif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis.

Selain itu, Arief Wahyudi (2020) (dalam branson, 1999) menyatakan Komponen – komponen *civic education* yaitu:

- a. *Civic Knowledge* berkaitan dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Aspek ini menyangkut kemampuan akademik keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. Dengan demikian, mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang kajian multidisipliner.
- b. *Civic Skills* meliputi keterampilan intelektual (*intelectual skills*) dan keterampilan berpartisipasi (*participatory skills*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh keterampilan intelektual Adalah

keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, misalnya merancang dialog dengan DPRD. Contohnya keterampilan berpartisipasi merupakan keterampilan dalam menggunakan hak dan kewajiban dalam bidang hukum, contohnya jika terjadi suatu kejahatan maka segera melapor kepada pihak yang berwajib.

- c. *Civic Dispositions* merupakan dimensi yang paling substantif dan esensial dalam mata Pelajaran PKn. Dimensi karakter kewarganegaraan dapat dinilai sebagai "muara" dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan mata pelajaran PKn, karakteristik mata Pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap dan potensi lain yang bersifat afektif.

3. Indikator *civic competence*

Menurut Cholisin *et al.*, (2018) karakter kewarganegaraan mencakup karakter privat (pribadi) dan karakter publik (kemasyarakatan) yang meliputi :

- a. Menjadi anggota Masyarakat yang *idependen* (mandiri).
- b. Memenuhi tanggungjawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik.
- c. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu.
- d. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara bijaksana dan efektif.
- e. Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat.

Dari 5 indikator di atas yang di amati dalam penelitian ini yaitu berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara bijaksana dan efektif, yang di dalamnya memiliki indikator sebagai berikut:

- a. Keberadaban (*civility*), yang termasuk sifat ini antara lain:
 - 1) Menghormati orang lain
 - 2) Menghormati pendapat orang lain meskipun tidak sepaham
 - 3) Mendengarkan pandangan orang lain.
 - 4) Menghindari agrumentasi yang bermusuhan, sewenang-wenang, emosional dan tidak masuk akal.

- b. Menghormati hak-hak orang lain, yang termasuk sifat ini antara lain:
 - 1) Menghormati hak orang lain bahwa mereka memiliki suara yang sama dalam pemerintahan dan sama di mata hukum
 - 2) Menghormati hak orang lain untuk memegang dan menganjurkan gagasan yang bermacam dan bekerjasama dalam suatu asosiasi untuk memajukan pandangan-pandangan mereka.
- c. Menghormati hukum, yang termasuk sifat ini antara lain:
 - 1) Berkemauan mematuhi hukum, bahkan Ketika ia menyepakatinya.
 - 2) Berkemauan melakukan Tindakan dengan cara-cara damai dan legal untuk mengubah yang tidak arif dan adil.
- d. Jujur, berkemauan untuk memelihara dan mengekspresikan kebenaran.
- e. Berpikiran terbuka yaitu mempertimbangkan pandangan orang lain.
- f. Berpikir kritis, yaitu kehendak hati untuk mempertanyakan keabsahan/kebenaran berbagai macam posisi termasuk posisi dirinya.
- g. Bersedia melakukan negosiasi dan kompromi, yaitu kesediaan untuk membuat kesepakatan dengan orang lain meskipun terdapat perbedaan yang sangat tajam/mendalam, sejauh hal itu dinilai rasional dan adanya pembenaran secara moral untuk melakukannya.
- h. Ulet/tidak mudah putus asa, yaitu kemauan untuk mencoba berulang-ulang untuk meraih suatu tujuan.
- i. Berpikiran kewarganegaraan, yaitu memiliki perhatian dan kepedulian terhadap urusan-urusan publik/kemasyarakatan.
- j. Keharusan/memiliki perasaan kasihan, yaitu mempunyai kepedulian agar orang lain hidupnya lebih baik. Khususnya terhadap mereka yang kurang beruntung
- k. Patriotisme, yaitu memiliki loyalitas terhadap nilai-nilai demokrasi konstitusional.
- l. Keteguhan hati, yaitu kuat untuk tetap pada pendiriannya.

D. Civic Disposition

1. Pengertian Civic Disposition

Menurut Nasution (2023) *Civic disposition* adalah sikap dan karakter kewarganegaraan yang mencerminkan internalisasi nilai-nilai sebagai warga negara yang aktif, bertanggung jawab, peduli sosial, serta memiliki kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dukung oleh pendapat Frican Tutuarima *et al.*, (2022) bahwa *Civic disposition* merupakan komponen karakter atau sikap kewarganegaraan yang mencerminkan cara berpikir, bertindak, dan bersikap seseorang sebagai warga negara yang bertanggung jawab, peduli sosial, serta aktif dalam kehidupan masyarakat dan demokrasi. Dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila, *civic disposition* adalah sikap-sikap dan nilai-nilai penting yang perlu dimiliki siswa supaya mereka bisa bertingkah laku sebagai warga negara yang baik. Tujuan utama dari *civic disposition* adalah untuk menumbuhkan karakter warga negara yang meliputi karakter privat dan karakter publik.

Berdasarkan para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan teori para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa *civic disposition* adalah sikap dan kepribadian kewarganegaraan yang terbentuk ketika seseorang menyerap dan menghayati nilai-nilai kewarganegaraan. Sikap ini terlihat dari cara seseorang berpikir, berperilaku, dan bertindak sebagai warga negara yang aktif, bertanggung jawab, serta peduli pada kehidupan sosial dan demokrasi. Dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila, *civic disposition* menjadi dasar untuk membentuk perilaku siswa supaya mereka bisa bertindak sebagai warga negara yang baik sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, bangsa, dan negara.

2. Dimensi Civic Disposition

Menurut Merdisa (2024) *civic disposition* menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter kewarganegaraan karena menentukan kualitas partisipasi warga negara dalam kehidupan demokratis. Dalam pelajaran Pendidikan Pancasila, *civic disposition* berperan sebagai penghubung antara

pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan. Sejalan dengan itu Monica, (2024) menyatakan Jika siswa tidak memiliki karakter *civic disposition* yang kuat, maka pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan yang sudah mereka pelajari tidak akan diterapkan dalam kehidupan nyata. Karena itu, membentuk *civic disposition* menjadi tujuan utama dalam Pendidikan Pancasila, seperti yang ditekankan dalam Kurikulum Merdeka dan Profil Pelajar Pancasila.

Secara konsep, *civic disposition* dalam penelitian ini dikaji melalui tiga dimensi utama, yaitu *civic commitment*, *civic responsibility*, dan *civic competence*, yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

a. *Civic Commitment* (Komitmen Kewarganegaraan)

Menurut Achmadi (2023) *civic commitment* peserta didik dapat dilihat dari tingkat keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran, keseriusan mengikuti kegiatan belajar, serta kesanggupan menyelesaikan tugas sesuai kesepakatan. *Civic commitment* tidak hanya berlaku untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kelompok atau bersama-sama, siswa yang memiliki *civic commitment* yang baik akan peduli terhadap keberhasilan kelompok dan kepentingan bersama. Sejalan dengan pendapat Safitri *et al.*, (2025) menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis proyek mampu memperkuat *civic commitment* karena peserta didik merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan proyek yang dikerjakan secara bersama-sama.

Berdasarkan teori para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa *Civic commitment* adalah bagian dari *civic disposition* yang berhubungan dengan keseriusan, konsistensi, dan keteguhan seseorang dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Dalam pembelajaran, *civic commitment* terlihat dari kemauan siswa untuk ikut aktif, mengerjakan tugas dengan konsisten, dan tetap berkomitmen terhadap tujuan bersama.

b. *Civic Responsibility* (Tanggung Jawab Kewarganegaraan)

Menurut Merdisa *et al.*, (2024) *civic responsibility* merupakan inti dari pembentukan karakter warga negara yang beretika dan berorientasi pada kepentingan bersama. *Civic responsibility* adalah bagian dari *civic disposition* yang berkaitan dengan kesadaran seseorang untuk menjalankan kewajibannya dan kesiapan untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari masyarakat.

Dalam pelajaran Pendidikan Pancasila, *civic responsibility* bisa dilihat dari perilaku nyata siswa, seperti mengerjakan tugas tepat waktu, menjalankan tugasnya saat kerja kelompok, mematuhi aturan kelas, dan bersikap jujur dalam belajar. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Wanabuliandari & Ardianti, (2020) bahwa sikap tanggung jawab peserta didik berkembang melalui pembiasaan dan pengalaman langsung, bukan hanya melalui penanaman nilai secara verbal.

Menurut Nurhijatina *et al.*, (2024) menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis proyek mendorong siswa untuk memahami konsekuensi dari setiap tindakan, karena keberhasilan proyek sangat bergantung pada kontribusi masing-masing anggota kelompok. Dengan demikian, peserta didik belajar bahwa sikap tidak bertanggung jawab akan berdampak pada kepentingan bersama.

c. *Civic Competence* (Kompetensi Kewarganegaraan)

Menurut Nurhijatina (2024) *civic competence* berkembang melalui pembelajaran yang memberikan ruang partisipasi aktif dan pengalaman belajar yang kontekstual. Dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila, *civic competence* dapat dikembangkan melalui aktivitas diskusi, presentasi, simulasi, dan kegiatan proyek sejalan dengan pendapat Achmadi *et al.*, (2023) bahwa keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran yang menuntut pemecahan masalah dan refleksi pengalaman belajar mampu meningkatkan kompetensi kewarganegaraan secara signifikan. Melalui proses tersebut, siswa tidak hanya memahami

konsep kewarganegaraan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata.

Berdasarkan para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kemampuan warga negara yang baik pada siswa akan berkembang dengan baik jika cara belajarnya tidak hanya duduk diam mendengarkan, tapi juga ikut terlibat aktif. Dalam pelajaran Pendidikan Pancasila, ketika siswa diajak berdiskusi, mengerjakan proyek, bermain peran, atau memecahkan masalah nyata, mereka tidak cuma paham teorinya saja, tapi juga bisa langsung mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

3. *Project Based Learning (PjBL)* Sebagai Pendekatan untuk *Civic Disposition*

Menurut Cahyati & Rizqia (2025) penerapan *Project Based Learning* dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila mampu meningkatkan sikap kewarganegaraan peserta didik, seperti tanggung jawab, kerja sama, toleransi, dan kepedulian sosial. Melalui kegiatan proyek, peserta didik dilatih untuk menyelesaikan tugas secara kolaboratif dan bertanggung jawab terhadap hasil kerja kelompok, yang merupakan bagian penting dari *civic disposition*. Sejalan dengan pendapat Novitasari *et al.*, (2019) pentingnya desain Pembelajaran berbasis proyek untuk memengaruhi sikap kewarganegaraan secara langsung melalui pengalaman belajar yang nyata. Hal tersebut menunjukkan bahwa PjBL memiliki potensi untuk mempengaruhi *civic disposition* secara signifikan, namun perlu perhatian pada desain dan implementasinya.

Menurut teori para ahli di atas maka dapat disimpulkan, Dengan menggunakan metode Pembelajaran Berbasis Proyek atau *Project Based Learning*, peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar yang mengharuskan mereka bekerja sama, membuat keputusan, menyusun rencana, dan merenungkan hasil dari apa yang telah mereka lakukan. Semua langkah ini memberikan peluang bagi siswa untuk belajar secara lebih dalam dan menyerap nilai-nilai kewarganegaraan melalui pengalaman

langsung. Hasilnya, sikap dan karakter kewarganegaraan siswa menjadi lebih kuat dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka.

4. Hubungan *Project Based Learning* dengan *Civic Disposition*

Menurut Safitri (2025) *Model Project Based Learning* memiliki hubungan yang erat dengan pembentukan *civic disposition* siswa. Melalui proyek yang dikerjakan bersama-sama, siswa dilatih untuk memiliki *civic commitment* dengan menyelesaikan tugas secara konsisten, *civic responsibility* dengan membagi peran dan tanggung jawab dalam kelompok, serta *civic competence* melalui diskusi, presentasi, dan memecahkan masalah. Sejalan dengan pendapat Nurhijatina *et al.*, (2024) bahwa Model *Project Based Learning* mampu meningkatkan partisipasi aktif peserta didik, sehingga berkontribusi pada penguatan kompetensi kewarganegaraan. Dengan demikian, Model *Project Based Learning* menjadi model pembelajaran yang relevan dan efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila guna membentuk *civic disposition* peserta didik secara komprehensif.

Berdasarkan teori para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa model *Project Based Learning* (PjBL) memiliki hubungan yang erat dengan pembentukan *civic disposition* siswa dalam pelajaran Pendidikan Pancasila. Model PjBL tidak hanya berfungsi sebagai cara mengajar, tetapi juga sebagai alat untuk mengembangkan sikap dan karakter kewarganegaraan, melalui keterlibatan aktif dalam proyek kelompok, siswa dilatih untuk menumbuhkan *civic commitment* dengan menyelesaikan tugas secara konsisten, *civic responsibility* dengan membagi peran dan tanggung jawab dalam kelompok, serta *civic competence* melalui diskusi, presentasi, dan memecahkan masalah. Dengan demikian, penggunaan PjBL mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna dan sesuai dengan kehidupan nyata, sehingga efektif dalam membentuk *civic disposition* siswa secara menyeluruh sesuai dengan tujuan Pendidikan Pancasila.

Dalam penelitian ini implementasi Model PjBL itu dalam Upaya meningkatkan *civic disposition* peserta didik pada indikator yang ke-4 yaitu

berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara bijaksana dan efektif.

E. Pendidikan Pancasila

1. Pengertian Pendidikan Pancasila

Menurut Nasution (2023) Pendidikan Pancasila Adalah kegiatan belajar yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air serta karekter kewarganegaraan yang berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila tersebut peserta didik tidak hanya mampu memahami, nilai-nilai pancasila, melainkan mampu menghayati serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan pendapat Nurjanah *et al.*, (2024) bahwa Pembelajaran Pendidikan Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat untuk benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupam sehari-hari.

Berdasarkan teori para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Pancasila merupakan suatu progres belajar yang memiliki tujuan untuk menanamkan perasaan cinta terhadap tanah air, serta meningkatkan karakter warga negara yang baik berdasarkan norma, nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila peserta didik tidak hanya diharapkan mengerti secara teori saja, melainkan juga dapat meresapi dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Pendidikan Pancasila juga mempunyai peran yang sangat krusial dalam membentuk masyarakat yang benar-benar bisa menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bersama, baik di lingkungan masyarakat, bangsa, ataupun negara.

2. Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan *Civic Disposition*

Menurut Syahwaliana *et al.*, (2025) Pendidikan Pancasila memiliki peran strategis dalam pembentukan *civic disposition* peserta didik karena mata pelajaran ini secara langsung menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dan nilai moral yang menjadi dasar sikap kewarganegaraan yang baik. Artinya pembelajaran Pendidikan Pancasila tidak hanya bertujuan

meningkatkan pemahaman kognitif peserta didik, tetapi juga membentuk karakter dan komitmen peserta didik terhadap nilai-nilai Pancasila.

Secara konsep Pembentukan Karakter Kewarganegaraan tidak dapat dilepaskan dari pengembangan tiga komponen utama, yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition*. Cholisin (2018, hlm. 114) menjelaskan bahwa karakteristik Kewarganegaraan yang berisi nilai-nilai yang seharusnya tertanam pada diri setiap warga negara untuk menjalankan peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terbentuk saat terjadi perkembangan pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan pada dirinya.

Selain itu Triaswari *et al.*, (2024) menegaskan bahwa implementasi Pendidikan Pancasila dalam konteks Kurikulum Merdeka dapat memperkuat *civic disposition* peserta didik melalui pengalaman belajar yang bermakna, reflektif, serta kontekstual sehingga siswa tidak hanya memahami nilai Pancasila, tetapi juga menghayati dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, Pendidikan Pancasila bukan hanya mengajarkan pengetahuan kewarganegaraan di teori, tetapi juga melatih siswa agar berperilaku dan bersikap sesuai nilai-nilai warga negara yang baik.

Berdasarkan teori para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Pancasila mempunyai peran penting dalam membentuk sikap kewarganegaraan termasuk *civic disposition* peserta didik, pembentukan karakter warga negara tidak hanya melalui pemahaman materi Pelajaran saja, tetapi juga melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, serta penanaman nilai-nilai kebangsaan dalam diri peserta didik.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain dan berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai referensi dan bahan perbandingan untuk memperkuat dasar teori serta menjelaskan posisi penelitian.

Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini:

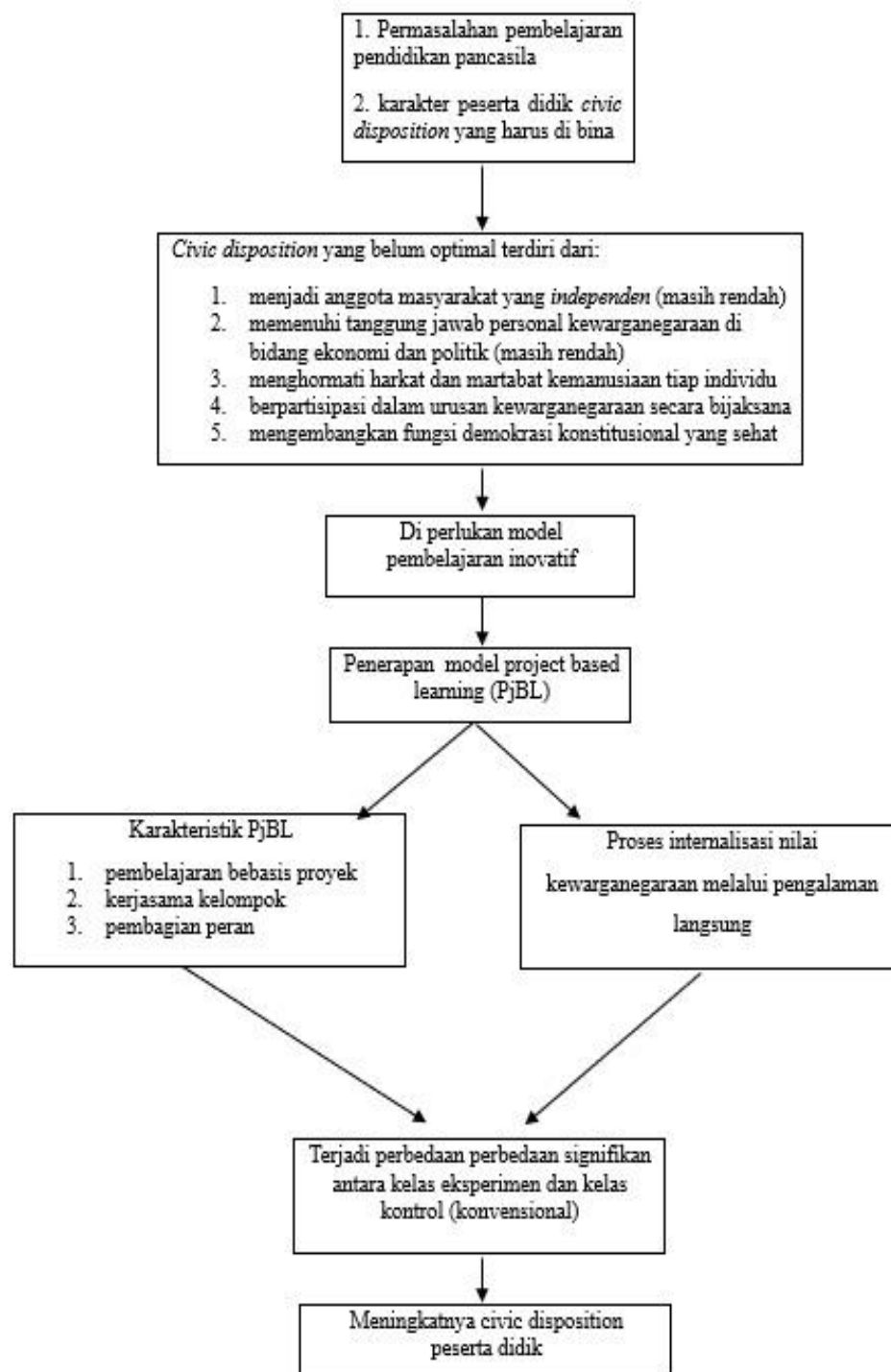
1. Penelitian yang dilakukan oleh Achmadi *et al.*, (2023) dengan judul *“Pengaruh Model Project Based Learning terhadap Karakter Tanggung Jawab Peserta Didik pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model Project Based Learning berdampak baik dan nyata terhadap peningkatan sikap tanggung jawab siswa. Siswa menjadi lebih tertib dalam mengerjakan tugas, merasa memiliki tanggung jawab terhadap proyek yang mereka kerjakan, serta bisa mempertanggungjawabkan hasil belajar mereka baik sendiri maupun berkelompok. Penelitian ini membuktikan bahwa PjBL efektif untuk membentuk karakter tanggung jawab siswa, tetapi belum secara khusus meneliti keefektifannya di tingkat MTs.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhijatina *et al.*, (2024) dengan judul *“Implementasi Project Based Learning dalam Mendukung Profil Pelajar Pancasila”*. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan model Project Based Learning dapat meningkatkan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila, terutama pada bagian kemandirian, kerja sama, dan tanggung jawab. Siswa dilatih untuk membagi tugas dalam kelompok, menyelesaikan pekerjaan sesuai kesepakatan bersama, dan bertanggung jawab atas hasil proyek mereka. Namun, penelitian ini hanya menjelaskan atau menggambarkan kondisi saja dan belum membandingkan secara angka perbedaan karakter tanggung jawab antara kelompok pembelajaran yang satu dengan yang lain.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Safitri *et al.*, (2025) dengan judul *“Project Based Learning dalam Pendidikan Abad ke-21: Penguatan Karakter dan Keterampilan Peserta Didik”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model PjBL berdampak baik terhadap peningkatan karakter disiplin dan tanggung jawab siswa. Fokus pada pembuatan produk nyata dan perenungan terhadap proses belajar membuat siswa lebih sadar akan tanggung jawab mereka dalam belajar. Namun, penelitian ini lebih banyak membahas keterampilan abad ke-21 secara umum, sehingga karakter tanggung jawab belum dibahas secara detail khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Indah *et al.*, (2026) dengan judul “*Analisis Permasalahan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Siswa*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah masih banyak menggunakan metode konvensional seperti ceramah, sehingga partisipasi peserta didik relatif rendah. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada analisis permasalahan Pembelajaran, sehingga belum secara khusus mengkaji penerapan model Pembelajaran tertentu untuk meningkatkan karakter atau kompetensi kewarganegaraan siswa.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Monica, (2024) dengan judul “*Pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka untuk Penguatan Karakter Peserta Didik*”. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila akan lebih berhasil dalam membentuk karakter siswa jika menggunakan model pembelajaran yang aktif dan sesuai dengan kehidupan nyata seperti *Project Based Learning*. Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila, termasuk tanggung jawab, dapat diserap dan dipahami siswa dengan lebih baik melalui pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung. Namun, penelitian tersebut belum meneliti secara khusus seberapa efektif PjBL terhadap karakter tanggung jawab dengan menggunakan metode percobaan atau *eksperimen*.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan gambaran atau alur pemikiran yang disusun peneliti sebagai dasar konseptual untuk menyelesaikan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya (Tunnisa & Alwi, 2024). Pembelajaran Pendidikan Pancasila sering kali masih membuat siswa kurang bersemangat karena lebih banyak menggunakan cara mengajar lama yang berpusat pada guru, seperti ceramah dan membaca buku teks saja, sehingga nilai *civic disposition* terutama sikap tanggung jawab siswa belum berkembang dengan baik. Oleh karena itu, peneliti menggunakan model Project Based Learning (PjBL) sebagai cara mengajar alternatif yang membuat siswa terlibat

aktif melalui kegiatan pembuatan proyek. Kerangka berpikir ini dibuat untuk mengetahui bagaimana penerapan model Project Based Learning dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila berdampak terhadap nilai *civic disposition* terutama dalam meningkatkan *civic disposition* peserta didik di kelas XI MA Darurrahman.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: disusun oleh peneliti 2026

H. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Asumsi penelitian adalah anggapan atau pandangan awal yang menjadi dasar peneliti sebelum memulai penelitiannya. Berikut adalah asumsi-asumsi yang dipakai dalam penelitian ini:

- a. Peserta didik kelas XI MA Darurrahman diduga belum menunjukkan Tingkat *civic disposition* dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila karena pembelajaran masih didominasi metode konvensional yang berpusat pada guru.
- b. Siswa kelas XI MA Darurrahman akan lebih aktif dan bertanggung jawab dalam belajar Pendidikan Pancasila jika menggunakan model pembelajaran yang membuat mereka terlibat langsung, seperti *model Project Based Learning* (PjBL).

2. Hipotesis

Hipotesis penelitian dibuat dengan mengacu pada teori, kondisi nyata di lapangan, dan penelitian-penelitian terdahulu. Hipotesis adalah perkiraan atau dugaan awal untuk menjawab masalah penelitian. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H_0 : Tidak terdapat efektivitas model *Project Based Learning* (PjBL) dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila terhadap peningkatan *civic disposition* peserta didik kelas XI MA Darurrahman.
- H_1 : Terdapat efektivitas model *Project Based Learning* (PjBL) dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila terhadap peningkatan *civic disposition* peserta didik kelas XI MA Darurrahman.